



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Selesaikan Aset Mantan Bupati dan Wabup

BENTENG - Pemkab Benteng mendapat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk segera menyelesaikan permasalahan aset mantan bupati dan mantan wabup periode 2017 - 2022. Hal itu berdasarkan LHP BPK yang sudah diserahkan ke Pemkab Benteng pada 13 Mei.

Sekda Benteng, Edy Hermansyah, Ph.D menerangkan salah satu poinnya Pemkab Benteng diminta melakukan pen-

tausahaan dan pengamanan aset pemda terkhusus kendaraan dinas, serta aset-aset yang berada di rumah bupati dan wabup.

"Kami diminta harus tegas melakukan pengamanan aset-aset milik daerah. Karena itu saya berharap bantuan dan support dari Pejabat Bupati Benteng, dan dapat memberikan arahan dan mendukung kami dalam melakukan langkah-langkah," harapnya.

Menurut Edy, berdasarkan LHP tersebut, penyelesaian masalah aset ini harus tuntas maksimal 60 hari sejak LHP diserahkan.

"Tak hanya dari Pejabat Bupati, saya juga berharap dukungan dari OPD terkait untuk menyelesaikan permasalahan aset ini, termasuk aset yang masih dipegang mantan bupati maupun wabup," ucapnya.

Edy tidak bisa memungkiri pengelolaan aset milik Kabupaten Benteng masih menjadi masalah. Namun tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Sebab saat ini Pemkab Benteng sudah berbenah dalam mengelola

dan manajemen aset daerah.

"Tidak hanya soal aset, soal rekomendasi LHP BPK lainnya saya juga meminta OPD terkait segera menyelesaikannya sesuai waktu yang diberikan. Sebab setiap temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK berbeda-beda," ujarnya.

Temuan atau rekomendasi yang disampaikan BPK RI diantaranya harus segera melengkapi administrasi dan beberapa kelebihan pembayaran. Soal temuan

kelebihan dalam pembayaran, terjadi di beberapa paket pengerjaan proyek fisik serta belanja barang dan jasa.

"Waktu maksimal untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi ini berdasarkan dari pelaksanaan masing-masing. Ada yang di bawah satu bulan sudah harus ditindaklanjuti, ada yang satu bulan harus ditindaklanjuti dan paling lama selama dua bulan sudah harus ditindaklanjuti," ungkap Edy. (jee)